

**Catatan Ringkas FGD Strategic Defense Review  
5 November 2003**

---

Doktrin TNI-AD Kartika Eka Paksi, Doktrin TNI-AL Eka Sasana Jaya, dan Doktrin TNI-AU Swa Buana Paksa disusun terutama untuk (1) menjawab tantangan reformasi politik yang menuntut adanya reformasi internal TNI; dan (2) menyediakan pedoman bagi pengembangan strategi pertahanan Indonesia. Sebagai bagian dari proses reformasi, ketiga doktrin tersebut berupaya untuk secara proporsional merumuskan peran dan fungsi ketiga angkatan terbatas pada peran dan fungsi pertahanan dalam suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Sebagai pedoman perumusan strategi pertahanan, ketiga doktrin tersebut berupaya untuk mengkaitkan antara karakteristik kekuatan masing-masing matra dengan jati diri prajurit serta pengembangan sistem pertahanan Negara.

Namun, dalam perumusan doktrin, masing-masing angkatan memiliki pintu masuk yang berbeda. Doktrin AD lebih menekankan pada pembentukan jati diri prajurit TNI-AD yang terkait dengan "warisan sejarah" TNI untuk terlibat aktif dalam upaya penyelamatan bangsa dan Negara. Doktrin Kartika Eka Paksi juga merumuskan secara detail tentang pola-pola operasi militer yang mungkin digelar AD serta perspektif AD tentang zona pertahanan Indonesia. Seperti dua doktrin lainnya, doktrin AD juga menjabarkan secara rinci fungsi pembinaan kekuatan AD.

Di sisi lain, doktrin AU dan AL dirumuskan sebagai upaya untuk mengoperasionalkan kekuatan laut (*maritime power*) dan kekuatan udara (*air power*). Penekanan pada kekuatan laut dan udara tersebut mengarahkan perumus doktrin untuk lebih berkonsentrasi kepada pengembangan dan pergelaran alat utama sistem pertahanan laut dan udara, tidak kepada jenis-jenis operasi militer di kedua matra.

Perbedaan ini tentunya menunjukkan karakteristik khusus masing-masing angkatan. Namun, tetap perlu ada suatu usaha sistematis sehingga karakteristik-karakteristik khusus tersebut dapat dipadukan dalam suatu doktrin TNI yang bersifat *joint doctrine*.

Hal terakhir yang penting untuk dicatat adalah ketiga doktrin angkatan dan doktrin TNI harus dibenturkan dengan regulasi-regulasi politik di bidang pertahanan negara. Perbenturan ini dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pertahanan Negara yang mampu menciptakan mekanisme pengembangan, pembinaan, pengerahan, dan penggunaan kekuatan TNI yang padu.\*\*\*